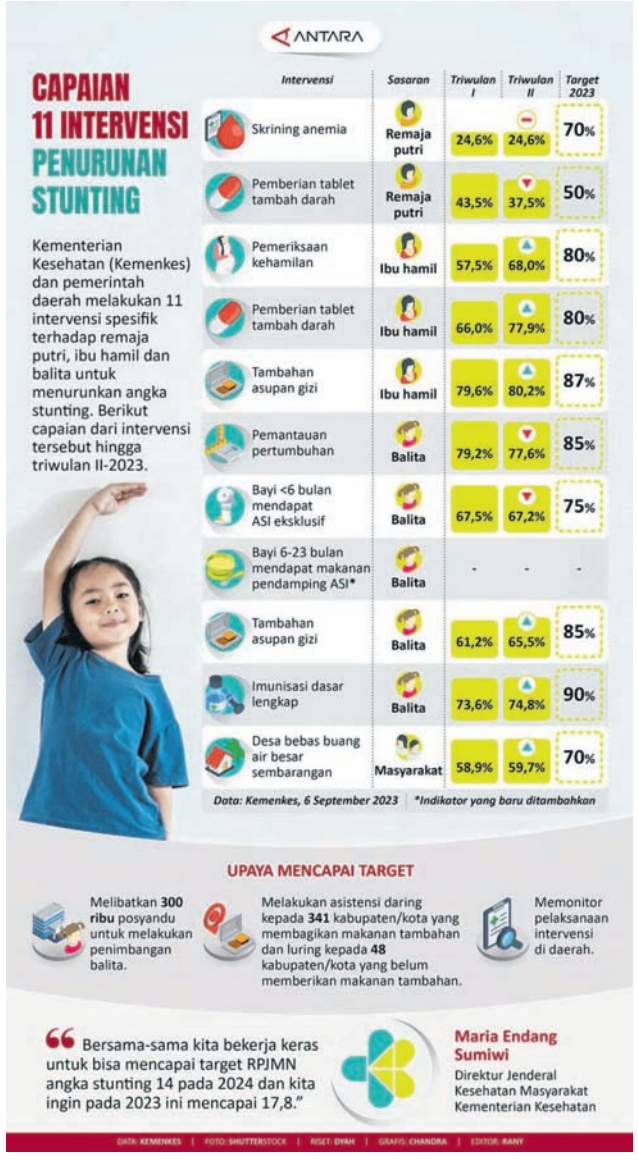

Pastikan Stok Aman, Presiden Jokowi Cek Gudang Bulog Bogor dan Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Bogor dan Jakarta untuk mengecek persediaan beras bagi kebutuhan masyarakat di tengah dampak kemarau akibat fenomena El Nino.

"Saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini (Bogor), di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada. barangnya ada, berasnya ada," ujar Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menginformasikan Presiden Jokowi mengunjungi Gudang Bulog di Jalan Nasional 11, Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden Jokowi memastikan stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. "Yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 ribu ton, sehingga akan ada stok 2 juta ton. Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta ton, normal. Ini kita memiliki 2 juta ton, sehingga kita tidak usah khawatir," kata Presiden Jokowi.

Meski demikian Presiden Jokowi memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi, guna meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara. "Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu, untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak," kata Presiden Jokowi.

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Spt/aa

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin saat meninjau persediaan beras di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia. Proses negosiasi, lanjutnya, dilakukan Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak. "Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri Modi, dengan RRC juga dengan Premier Li. Stok kita sudah banyak, tapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa. Tidak untuk sekarang, tapi untuk plan tahun depan, juga mengantisipasi," katanya.

Presiden juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Presiden mengatakan bantuan pangan untuk masyarakat akan disalurkan mulai bulan September hingga November. "Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan Bulog untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras," kata Presiden. **(ANTARA)**

HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

OIKN Terima 281 LoI Investor Swasta untuk Pembangunan IKN Nusantara

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hingga saat ini telah menerima 281 Letter of Intent (LoI) atau pernyataan minat dari investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

"Hingga saat ini kita sudah menerima 281 LoI," ujar Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/9).

Agung menambahkan LoI untuk pembangunan IKN tersebut masih didominasi dari negara-negara ASEAN. "Paling banyak masih tetap dari Singapura sebanyak 27 LoI, kemudian Jepang sebanyak 25 LoI, Malaysia sebanyak 19 LoI dan ada juga dari China sebanyak 17 LoI," katanya.

Agung berharap peningkatan jumlah LoI yang diterima oleh OIKN tersebut sebagai dampak positif dari promosi IKN dalam penyelenggaraan KTT Ke-43 ASEAN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki

ANTARA/Aji Cakti

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.

pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemindahan IKN dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. **(ANTARA)**

FOTO CERITA

Mengolah Limbah Menjadi Rupiah

PAGI itu di area pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sejumlah pemuda dari kelompok UMKM Telihan Recycle terlihat mengumpulkan sampah aluminium pembungkus pipa gas (insulation) yang sudah tidak terpakai dari PT Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur.

Sampah aluminium itu mereka kumpulkan dan dibawa ke bengkel kerja atau workshop untuk didaur ulang menjadi baling-baling perahu (propeller) yaitu kipas penggerak perahu bagi warga Bontang yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.

Pembentukan kelompok itu sendiri didasari dari kepedulian untuk mengurangi permasalahan lingkungan sekaligus bisa memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar, ujar salah satu pendiri kelompok UMKM Telihan Recycle, M Anomsius.

Komitmen mereka fokus terhadap pengelolaan sampah, bank sampah, dan pemanfaatan sampah terpadu masyarakat Bontang. Sehingga diharapkan juga dapat mengubah sudut pandang masyarakat dalam menilai sampah yang semula dianggap negatif menjadi suatu hal yang positif.

Inovasi produksi propeller dari aluminum bekas yang dilakukan oleh Telihan Recycle tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur. Tak hanya sampah aluminium dari PT Badak LNG saja yang mereka cari, namun juga termasuk sampah panci serta limbah sampah rumah tangga lainnya.

Pada prinsipnya, sampah aluminium itu dilebur terlebih dahulu lalu dicetak menjadi ingot (aluminium batangan). Pencetakan ingot itu bertujuan untuk menjaga tingkat kemurnian aluminium 99 persen dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada sampah logam itu.

Dari satu kilogram ingot bisa untuk memproduksi 4,Ài5 unit baling-baling perahu untuk ukuran mesin 13 PK dengan harga jual Rp15 ribu per buah. Jika dibandingkan, harga produk baling-baling aslinya berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah per buah.

Sebenarnya mereka mampu memproduksi hingga 500 buah baling-baling per bulan namun dalam pembuatannya tergantung permintaan atau kebutuhan pasar.

Dari bisnis daur ulang tersebut Telihan Recycle sudah mampu mempekerjakan 5 orang pekerja terlatih dengan standar gaji UMR sekitar Rp3 juta per bulan. Sehingga ke depan, mereka menargetkan pemasaran produknya itu dapat diperluas tidak hanya sebatas Kalimantan Timur tapi juga wilayah-wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini juga sedang gencarnya menyosialisasikan pengelolaan sampah spesifik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. Pemanfaatan dan pendauran ulang limbah/sampah terutama B3 tersebut merupakan bagian dari pengurangan sampah yang berujung hanya ke tempat pembuangan akhir dan berjejal.***

Foto & Teks: Muhammad Adimaja

ARTIKEL

Oleh Rizka Kherunnisa

Menangkap Potensi ASEAN Menuju Pemain Kunci di Industri EV Dunia

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati kerja sama dan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicles/EV) di kawasan ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk membangun kawasan sebagai pusat produksi global untuk industri kendaraan listrik. Hal tersebut tertuang dalam salah satu poin perjanjian kerja sama "ASEAN Leaders' Declaration on Developing Regional Electric Vehicle (EV) Ecosystem" pada KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT, Mei 2023.

Sebagaimana yang dikatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kawasan ASEAN diharapkan dapat menjadi bagian penting dari rantai pasok EV dunia yang menekankan hilirisasi industri.

Dalam KTT KE-43 ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9), diskursus berlanjut hingga mencapai kesepakatan pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh China, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ASEAN Plus Three penting bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan.

Baik China, Jepang, maupun Korea Selatan dapat dikatakan termasuk dalam pemimpin di bidang teknologi EV. Dengan adanya dukungan dari ketiga negara ini, ASEAN dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka melalui kerja sama teknologi, transfer pengetahuan, dan penelitian bersama. Pengamat otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu memandang bahwa kerja sama erat ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan dalam pengembangan teknologi EV dapat menciptakan ekosistem yang komprehensif dan kompetitif.

Dengan menggabungkan sumber daya alam, pasar yang besar, teknologi canggih, dan infrastruktur yang solid, dinilai ASEAN memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci dalam industri kendaraan listrik dunia.

Hal ini dapat mengubah peta industri EV global, dengan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan baru yang menggantikan Eropa dan Amerika dalam beberapa dekade mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengatakan bahwa pengembangan ekosistem EV di ASEAN merupakan langkah yang menjanjikan apalagi kawasan tengah bertumbuh dan memiliki berbagai modalitas yang akan mendukung pembangunan produksi EV di kawasan.

Dengan populasi penduduk lebih dari 600 juta jiwa, ASEAN diyakini menjadi pasar yang potensial dengan peluang investasi menjanjikan. Adapun estimasi pasar EV di kawasan ASEAN mencapai 2,7 miliar dolar AS di tahun 2027. Apalagi, menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, investasi ekosistem EV di ASEAN meningkat 570 persen pada 2022 dan diperkirakan akan terus bertumbuh.

Kondisi setiap negara anggota ASEAN memang tidak homogen. Sejumlah negara tengah mengembangkan ekosistem EV-nya sendiri termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Beberapa negara anggota ASEAN juga memiliki relasi bisnis dengan negara lain di luar ASEAN.

ANTARA/Biro Humas Kemenperin/pri

Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menguji coba sepeda motor listrik Katalis EV.1000.

Namun alih-alih hanya berkompetisi, para pemimpin ASEAN pun sepakat bahwa kerja sama dibutuhkan di antara negara anggota sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih kompetitif dalam rantai pasok dunia.

Dalam dokumen deklarasi yang disahkan saat KTT Ke-42, disebutkan pula bahwa pengembangan ekosistem EV melibatkan semua negara anggota ASEAN yang mendukung adopsi EV dan peningkatan industri EV. Meski begitu, para pemimpin juga menyadari adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan kebijakan dalam negeri di antara anggota ASEAN.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengingatkan kesepakatan dalam tataran pemimpin ASEAN perlu diterjemahkan ke dalam pemetaan yang rinci mengenai keunggulan masing-masing negara anggota. Prinsip yang sama juga pernah diadaptasi dalam kerja sama pengembangan kendaraan konvensional.

"Komponen besar di-breakdown lagi menjadi komponen-komponen kecil. Di sisi lain, ada juga pendukung-pendukung lainnya seperti lembaga penelitian dan balai uji. Jadi, mata rantainya panjang sekali," ujar Kukuh.

Malaysia, misalnya, memiliki keunggulan dari segi komponen semikonduktor yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok EV. Negara anggota lain yang dinilai telah siap dalam sektor EV, seperti Thailand dan Vietnam, juga memiliki andil penting di dalam pembangunan lanskap ekosistem EV ASEAN.

Sementara Indonesia unggul dalam sumber daya nikel yang menjadi salah satu bahan baku mineral untuk baterai EV. Diketahui, Indonesia merupakan negara dengan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dunia dengan angka mencapai 23 persen. Di samping itu, ada pula Filipina yang juga unggul dalam sumber daya nikel.

Teknologi EV dapat dikatakan masih baru dengan harga yang relatif mahal. Namun dengan adanya kerja sama pengembangan ekosistem EV ASEAN, pengamat otomotif lain dari ITB, Agus Purwadi, memandang bahwa kawasan akan mendapat manfaat dengan skala ekonomi (economies of scale) yang terus meningkat. Seiring dengan itu, diharapkan harga EV bisa turun atau lebih terjangkau, terutama untuk komponen baterai.

'Pekerjaan Rumah' Selanjutnya

Sebagai negara yang menginisiasi kolaborasi pembangunan ekosistem EV melalui Keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia perlu berperan aktif dalam menyelaraskan perbedaan regulasi di antara negara-negara ASEAN.

Ini menjadi "pekerjaan rumah" selanjutnya bagi ASEAN untuk mewujudkan ambisi sebagai pemain kunci di industri EV dunia. Yannes menilai, harmonisasi regulasi menjadi landasan utama dalam memaksimalkan kerja sama ekosistem EV di ASEAN. Hal ini juga demi keuntungan Indonesia.

Keseragaman regulasi terkait kendaraan listrik di ASEAN merupakan kunci dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota. Kedua pengamat, baik Yannes maupun Agus, juga sepakat bahwa Indonesia perlu bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk menciptakan kerangka kerja atau peta jalan (roadmap) yang detail, jelas, dan konsisten.

Kesepakatan yang telah dibuat juga perlu diikuti dengan rencana tindakan (action plan) yang terukur. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi ASEAN untuk menghindari stagnasi kesepakatan kerja sama yang tidak hanya tertulis di atas kertas. Jangan sampai, pasar dan pemain EV yang potensial ini diambil alih oleh negara-negara lain di luar kawasan.

Di sisi lain, menurut pandangan Yannes, Indonesia juga harus melakukan antisipasi lain untuk dapat mengambil manfaat sepenuhnya dari peluang kerja sama tersebut. Selain mengupayakan penyelarasan regulasi, Indonesia perlu melengkapi diri dengan penyediaan infrastruktur pendukung EV, seperti pengisian baterai, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam negeri.

Indonesia juga harus memperhatikan dampak lingkungan, termasuk manajemen limbah baterai yang dilakukan dengan bijak serta praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini mengingat produksi dan pemusnahan baterai EV memiliki dampak lingkungan yang signifikan apabila tidak dikelola dengan baik.

Kesiapan tenaga kerja terampil juga perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan industri EV akan membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi terkini. Oleh sebab itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas menjadi kunci.

Terakhir, persaingan global yang ketat dalam industri EV harus dihadapi dengan inovasi dan daya saing produk nasional yang kuat. Indonesia harus memastikan produknya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengincar pangsa pasar EV.

Dengan mengantisipasi hal-hal itu, Indonesia diharapkan tidak hanya dapat memaksimalkan manfaat kerja sama ekosistem EV di ASEAN melainkan juga menjadi pemain kunci dalam industri EV di kawasan serta memperkuat posisinya dalam geopolitik global. ***